

**KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
BATAM DALAM IMPLEMENTASI PERDA
NO 2 TAHUN 2011**

SKRIPSI



Oleh:

Elsa Kristiani

161010016

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
BATAM DALAM IMPLEMENTASI PERDA
NO 2 TAHUN 2011**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh:

Elsa Kristiani

161010016

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Elsa Kristiani
Npm : 161010016
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa "SKRIPSI" yang saya buat dengan judul:

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM DALAM IMPLEMENTASI PERDA NO 2 TAHUN 2011

Adalah hasil karya sendiri bukan "duplikasi" dari orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila terdapat di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapaun.

Batam, 27 Januari 2023



Elsa Kristiani
161010016

**KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
DALAM IMPLEMENTASI PERDA NO 2 TAHUN 2011**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh

Elsa Kristiani

161010016

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 27 Januari 2023



Timbul Dompok, S.E., M.Si.

Pembimbing

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Dama Implementasi Perda No 2 Tahun 2011 tentang Gedung, yang dimana isi dari Perda tersebut mengenai gedung-gedung yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penelitian ini kemudian dibedah lagi atau di perkecil lagi untuk sekala penelitiannya yaitu bagaimana kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dalam menertibkan gedung-gedung atau bangunan, rumah liar (ruli) dan kios-kios tanpa Surat Izin. Supaya bisa menciptakan Kota Batam lebih terstruktur dalam tata letak bangunan dan bisa di contoh oleh Kota-kota lainnya, karena Kota Batam adalah kota transit atau kota yang berdekatan dengan Singapura sehingga banyak turis mancanegara yang berkunjung ke batam. Oleh karena itu Kota Batam perlu membenahi tata kota dengan lebih baik dan rapih, seperti yang kita ketahui bahwa di Batam terdapat banyak bangunan ataupun gedung, rumah liar (ruli) bahkan ada yang mendirikan kios tanpa memiliki izin untuk setelah itu dijadikan tempat usaha. Untuk bisa menciptakan tata kelola yang lebih baik Kota Batam harus sudah mulai pemerataan patroli diwilayah-wilayah yang terdapat gedung, bangunan, rumah liar (ruli) ataupun kios-kios, sehingga dapat menyongsong perekonomian Kota Batam lebih maju dan lebih baik lagi. Pada tahap tata kelola kota, tentunya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam perlu arahan dari atasannya yang telah berkoordinasi dengan pihak Dinas tertentu.

Kata Kunci : Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Perda

ABSTRACT

The study aims to determine the performance of the Civil Service Police Unit in Batam City and the Implementation of Regional Regulation No. 2 of 2011 concerning Buildings, which contains the contents of the Regional Regulation regarding buildings that do not have a Building Permit (IMB), this research is then dissected again or reduced again for the scale of his research, namely how the performance of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Batam City in controlling buildings or structures, illegal houses (ruli) and stalls without a permit. In order to make Batam City more structured in the layout of buildings and can be emulated by other cities, because Batam City is a transit city or a city adjacent to Singapore so that many foreign tourists visit Batam. Therefore Batam City needs to improve urban planning in a better and tidier way, as we know that in Batam there are many buildings or buildings, illegal houses (ruli) and some even set up kiosks without having a permit to afterwards be used as a place of business. To be able to create better governance, Batam City must start equal distribution of patrols in areas where there are buildings, illegal houses (ruli) or stalls, so that it can support the economy of Batam City to be more advanced and even better. At the city governance stage, of course the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Batam City needs direction from their superiors who have coordinated with certain departments.

Keyword: *Civil Service Police Unit, Performance, Perda*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu prasarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.SI. sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP. selaku Ketua Progam Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam;
3. Bapak Timbul Dompok, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan motivasi untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam;

4. Ibu Lubna Salsabila, S.IP., M.I.P., MPA. Yang telah membimbing dan banyak membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Segenap Dosen Jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
6. Bapak/ Ibu Dosen Penguji selaku penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis;
7. Segenap Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan meotivasi dan mendo'akan yang terbaik untuk penulis;
9. Seluruh keluarga Besar Satuan Polisi Pamong Praja dan terkhusus kepada Bapak Alex Wahyudi, S.E.,M.Si. yang telah membantu penulis;
10. Untuk seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang telah mengijinkan peneliti untuk melakukan penelitian;
11. Narasumber penulis lainnya dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
12. Untuk sahabat penulis, Dwi Secti, Vivi Ardiani, Jamiatus Solikha, Khoirul Umam, Bagus Cecep Effendi yang sudah membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;

13. Rekan mahasiswa/I seperjuangan Universitas Putera Batam Program Studi Administrasi Negara angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini secara langsung maupun tidak.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta dapat dikembangkan lebih lanjut. Aamiin

Batam, 27 Februari 2023



Elsa Kristiani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kinerja	12
2.1.1 Indikator Kinerja	14
2.2 Implementasi Kebijakan.....	15
2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja	16
2.4 Implementasi Perda No 2 Tahun 2011	22
2.5 Penelitian Terdahulu.....	22
2.6 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Fokus Penelitian	28
3.3 Sumber Data	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Metode Analisis Data	30
3.6 Keabsahan Data	31
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	32

3.7.1	Lokasi	32
3.7.2	Jadwal Penelitian	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian.....	34
4.1.1	Gambaran Umum Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	34
4.1.2	Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	35
4.1.3	Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	36
4.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.....	36
4.1.5	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	40
4.1.6	Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	41
4.2	Pembahasan	43
4.2.1	Mekanisme Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.....	43
4.2.2	Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Implementasi Perda No 2 Tahun 2011	44
4.2.3	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satpol PP	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Simpulan.....	65
5.2	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
Lampiran 1. Pendukung Penelitian		
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Grafik Penduduk Kota Batam	5
Gambar 4.1 Tujuan dan Sasaran Satpol PP dalam RJM.....	39
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Batam	40
Gambar 4.3 Indikator Kinerja Utama Satpol PP Kota Batam	44
Gambar 4.4 Tujuan dan Sasaran RJM Satpol PP Kota Batam	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penduduk Kota Batam	4
Tabel 1.2 Jumlah Perumahan Liar Di Kota Batam.....	7
Tabel 1.3 Data Rumah Liar Di Kecamatan Batu Aji.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	29
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Negari Sipil Satpol PP Kota Batam	41
Tabel 4.2 Daftar Inventaris Satpol PP Kota Batam	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia adalah Negara yang dibagi atas wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimana tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki pemerintah daerahnya sendiri. Bahkan hal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang. Sehingga pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan yang diberikan oleh Otonomi daerah yang luas kepada untuk menjalankan kegiatan daerahnya secara mandiri, nyata dan bertanggung jawab. Berhasilannya penyelenggaraan sistem otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuan daerah untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.

Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki pulau sehingga hukum yang mengatur setiap penduduk tanpa memihak untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta kedamaian, dengan adanya hukum yang dibuat masyarakat diharapkan lebih tertib dan menaati peraturan hukum yang ada, ketertiban umum merupakan landasan bagi masyarakat untuk bisa bersosialisasi dengan aman dan nyaman dengan sesama. Begitu pula dengan halnya pembangunan.

Pembangunan perumahan yang dibangun merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu tempat tinggal. Berhubung adanya pembangunan juga bisa meningkatkan mutu hidup, dapat membuka lapangan

pekerjaan, memajukan perekonomian supaya mencapai ketinggian kesejahteraan salah satunya di Kota Batam.

Visi Kota Batam adalah Terciptanya penataan Kota yang mendukung terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia yang madani dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Nasional dan Misi salah satunya dari 5 poin ialah prasarana pendukung yang berkelanjutan, sementara saat ini tingkat *urbanisasi* yang terlalu tinggi mengakibatkan munculnya berbagai macam hal mengenai bangunan bermasalah seperti pemukiman liar dan kios tanpa memiliki surat izin. Namun, bangunan tanpa izin konstruksi (IMB) terletak di perumahan atau ruang terbuka.

Dengan banyaknya bangunan yang bermasalah atau bangunan liar dan kumuh adalah terjadinya peningkatan penduduk yang dimana angka kemiskinan dan kurangnya partisipasi Pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan dan pengendalian pertumbuhan warga Kota Batam. Tingginya peningkatan penduduk akan berdampak pada perekonomian bisa mengakibatkan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi selain itu pembangunan rumah liar, kios dan gedung-gedung yang tidak memiliki izin yang menempati milik orang lain maupun milik Negara.

Menurut Wahyudi dan Azheri, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertera pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 yang disebutkan bahwa izin mendirikan bangunan diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan untuk pembangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat

bangunan dengan sesuai persyaratan teknis yang berlaku. (Wahyudi & Azheri, 2011).

Menurut BP Batam, selama 5 tahun terakhir jumlah bangunan liar di Kota Batam Meningkat mencapai 100 ribu unit data tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam Bapak Said Hasyim. Warga yang memiliki rumah, ruko dan bangunan lainnya wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang dimana setiap tahunnya wajib melakukan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau memperoleh manfaat bangunan, bangunan tertentu harus mendapatkan izin tertulis baik dari Dinas Tata Kota sebagai peraturan pelaksana setiap daerah harus mengaturnya masing-masing.(Kesowo, 2002)

Adapun persyaratan teknis yaitu:

1. Mengisi formulir permohonan dari bagian Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) di Kantor Kecamatan atau Kantor Bupati.
2. Mendapatkan persetujuan dari lingkungan sekitar atau penduduk setempat, seperti izin gangguan atau izin HO.
3. Bangunan yang dibangun harus mengikuti tata ruang kota.

Diantara persyaratan administrasi tersebut adalah:

1. Foto kopi KTP pemohon.
2. Foto kopi PBB terakhir.
3. Salinan izin persetujuan pembangunan atau izin gangguan penduduk setempat.

4. Rencana lokasi bangunan yang akan dibangun surat keterangan status tanah atau sertifikat surat pernyataan hak milik tanah.
5. Surat pernyataan penataan.

Selain itu yang perlu di perhatikan ketika mengurus perizinan pembangunan prosedurnya seperti:

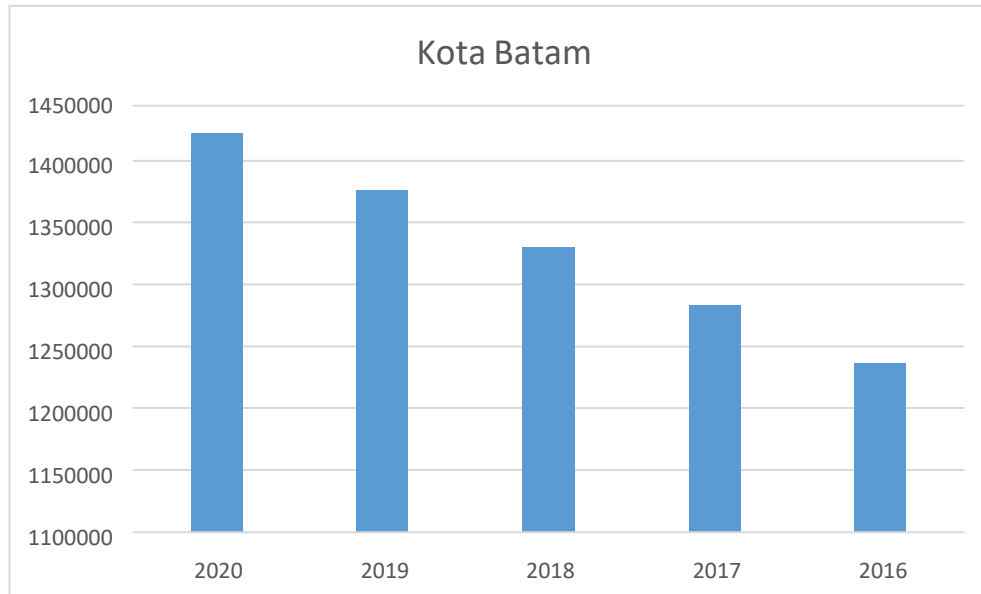
1. Mengajukan permohonan ke P2B untuk lokasi bangunan atau bangunan yang diusulkan, disertai dengan dokumen yang diperlukan.
2. Petugas P2B akan segera memeriksa berkas yang diberikan setelah melakukan pemeriksaan lapangan.
3. Setelah verifikasi data, P2B memberikan izin bangunan.
4. Jika telah memiliki izin bangunan, maka proses pembangunan dapat mulai pengerjaan sambil menunggu otoritas yang sesuai untuk mengeluarkan IMB.

Untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk warga serta tentram dan sejahtera diperlukan penataan tata letak lokasi dan penerbitan bangunan untuk wilayah Kota Batam. Tingkat urbanisasi tidak hanya terjadi di kota kota besar saja seperti Jakarta, Makasar, Manado tetapi kini Kota Batam juga sudah di penuhi oleh pendatang dari wilayah di seluruh Indonesia, hal ini menjadi sorotan pemerintah yang mengakibatkan terjadinya peningkatan Penduduk di Kota Batam

Tabel 1.1 Data Penduduk Kota Batam

Wilayah Batam	Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Perempuan + Laki-Laki) (Jiwa)				
	2020	2019	2018	2017	2016

Kota Batam 1421961 1376009 1329773 1283196 1236399



Gambar 1.1 Data Grafik Penduduk Kota Batam

Sumber informasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Batam

Pada gambar dan tabel, merupakan data Penduduk Kota Batam Selama 5 Tahun terakhir yaitu mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yang dimana penurunan data penduduk terjadi di tahun 2016 data tersebut 1,236,399 Jiwa, dan peningkatan penduduk terjadi pada tahun 2020 mencapai 1,421,961 Jiwa. Peningkatan penduduk ini terjadi karena banyak Penduduk baru yang datang ke Kota Batam untuk mencari kerja.(batampos.co.id, n.d.)

Tercatat di beberapa lokasi di Kota Batam yang terdapat lahan tanah yang kosong dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mendirikan bangunan yang dijadikan tempat tinggal ataupun tempat usaha (berdagang), pada kasus ini bangunan tersebut tidak memiliki izin. Terdapat jumlah ruli atau bangunan yang

bermasalah tidak memiliki izin di Kota Batam tercatat sebanyak 30.868 unit pada tahun 2017. Tim yang terjun langsung melihat dan mendapat menyebutkan ada 50 ribu unit tersebar di 9 kecamatan di Kota Batam meliputi seperti Batu Aji, Batu Besar, Bengkong, Batam Kota, Lubuk Baja, Sagulung, Sei Beduk, Nongsa, Barelang dan Sekupang. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Jalan Letjen R. Soeprapto, tepatnya di Simpang Barelang yang dimana lokasi tersebut adalah akses atau pintu gerbang untuk menuju lokasi wisata yang menyebabkan kemacetan panjang dikarenakan banyaknya bangunan liar di trotoar sehingga mengakibatkan jalan sempit yang tidak sesuai dengan volume kendaraan yang melalui jalan tersebut, sehingga bangunan liar di tertibkan untuk pelebaran jalan yang dimana tujuan dari pelebaran jalan tersebut bisa membuat akses jalan ke tempat wisata akan lancar.

Selain itu, sangat sulit untuk mencari pekerjaan di Kota Batam, dan meningkatnya harga perumahan, khususnya di Kecamatan Batu Aji dan sekitarnya, memaksa mayoritas warga untuk tinggal di bangunan (ruli) yang melanggar hukum. Parahnya lagi, jumlah warung haram yang berada di kawasan daerah penyangga di Kecamatan Batu Aji meningkat hampir sama dengan jumlah pemukiman liar. Sejak saat itu, tempat tinggal liar berkembang biak di Batu Aji. Menurut data yang diperoleh, terdapat 30.868 unit rumah haram di Kota Batam pada tahun 2017. 9 kecamatan, antara lain Kota Batam, Batu Aji, Batu Ampar, Bengkong, Lubuk Baja, Nongsa, Sagulung, Sekupang, dan Sei Beduk, semuanya tersebar. Mayoritas masyarakat yang tinggal di tempat tinggal kumuh terdapat di perkotaan kecamatan Batam, yaitu di kawasan Batu Aji.

Tabel 1.2 Jumlah Perumahan Liar Di kota Batam

NO	Penduduk Rumah Liar	Jumlah
	Yang sudah sudah terdata dan punyai NIK & ,KK	21.841 unit
	Yang belum terdata dan tidak mempunyai NIK dan KK	9027 unit

Tabel 1.3 Data Rumah Liar Di Kecamatan Batu Aji Tahun 2017

NO	KELURAHAN	Jumlah Pemukiman Liar
1	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN	906
2	KELURAHAN BULIANG	1052
3	KELURAHAN KIBING	2913
4	KELURAHAN TANJUNG UNCANG	2050

Sumber: Data Kecamatan Batu Aji 2017

Berdasarkan Tabel 2, di Kecamatan Batu Aji banyak terdapat rumah haram. Ada 6.921 orang dari 113.099.000 jiwa, dengan Kecamatan Kibing memiliki bangunan atau rumah yang paling banyak melanggar hukum. Mengingat maraknya konstruksi yang melanggar hukum, keamanan dan ketertiban umum dapat terancam setiap saat. Dalam konteks ini, "kerentanan" mengacu pada

kerapuhan sosial yang disebabkan oleh konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat di antara komunitas atau kelompok individu tertentu.

Berdasarkan riset Saragih pada 2018, sebanyak 9.027 unit kekurangan informasi yang dibutuhkan, antara lain kependudukan, kartu keluarga, dan nomor induk kependudukan (NIK). Perumahan kumuh tidak sama dengan perumahan liar (ruli). Perumahan kumuh dibangun di atas properti yang memiliki dokumentasi kepemilikan yang sah. Rumah liar (ruli), bagaimanapun, tidak. Secara umum, ruli di Batam terbuat dari bahan semi permanen yang mudah terbakar, seperti ruli Beverly yang terbakar pada 4 Juli. Atapnya terbuat dari terpal dan lebih menyerupai gubuk daripada dindingnya yang terbuat dari papan atau triplek, cabang mangrove, dan pilar. (Saragih, 2018)

Kinerja merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab sebuah organisasi, Instansi atau Pejabat Publik yang mana telah diberikan amanah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi agar dapat tercapainya sebuah tujuan. Hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Dinas yang bersangkutan atas kinerja dinas dalam mengatasi permasalahan-permasalahan permukiman liar dan kios tanpa Izin. Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penataan bangunan-bangunan bermasalah seperti rumah liar, kumuh bahkan dengan kios-kios yang dibangun secara Ilegal diatas lahan kosong milik orang lain maupun milik Negara adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan para Abdi Negara atau Aparatur Sipil Negara yang berada di bawah Pemerintah Daerah yang bertugas

melaksanakan peraturan ketertiban masyarakat, ketentraman serta melindungi masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.

Salah satu upaya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kota Batam menemui beberapa masalah diantaranya adalah Kecamatan Sagulung kelurahan Tembesi yaitu tepat dititik simpang barelang yang telah dieksekusi untuk dibenahi dan ditertibkan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja, puluhan kois-kios dan juga rumah masyarakat setempat telah habis diratakan dengan tanah. Dengan tujuan dan maksud untuk menertibkan bangunan-bangunan yang memperburuk penataan ruang Kota Batam dan juga dilakukan pembangunan infrastruktur untuk pelebaran jalan disekitar simpang barelang yang selama ini sering terjadi kemacetan yang cukup parah. Tentunya semua dilakukan sengan musyawarah dan diskusi antara masyarakat sekitar dengan pemerintah yang berwenang yang di eksekusi langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Tribun Batam, 2021).

Selain itu petugas juga menertibkan bangunan liar di row jalan 15 meter di salah satu kawasan hotel di Batam Centre pada hari Selasa, 8 Februari 2022. Penertiban tersebut dilakukan karena sudah tidak memiliki izin. Hal yang sama juga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 9 September 2021 dalam menertibkan bangunan liar karena sudah masuk row jalan industri Tanjung Uncang, Batu Aji kota Batam.(Sultan, 2022)

Dalam melakukan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan prosedur sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan memberitahu kepada

warga bangunan liar tersebut dalam bentuk Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali sehingga warga kooperatif dengan penertiban tersebut. Namun permasalahan pada bangunan-bangunan liar tersebut adalah sudah memasuki row jalan sehingga mengganggu infrastruktur jalan kota Batam.

Berdasarkan latar belakang serta masalah bangunan tanpa izin atau bangunan liar atau diatas yang diperoleh maka peneliti mengambil judul skripsi “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Dalam Implementasi Perda No 2 Tahun 2011”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam implementasi Perda No 2 tahun 2011?
2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam implementasi Perda No 2 tahun 2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang di atas meliputi antara lain:

1. Untuk menganalisa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Batam dalam implementasi Perda No 2 Tahun 2011.
2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang sudah dilakukan mempunyai keterkaitan dengan mata kuliah yang peneliti ambil antara lain Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik. Adapun manfaat yang dapat mencerminkan contoh langsung maupun tidak langsung seperti berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam implementasi Perda No 2 Tahun 2011 tentang gedung dan bangunan memiliki pemahaman tentang teori Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Batam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Objek Penelitian

- a. Sebagai masukan untuk memperbaiki kendala apa saja yang di dapat selama penelitian sehingga dikemudian hari tidak terjadi masalah serta lebih efisiensi.
- b. Informasi serta data yang diperoleh bisa sebagai pengambil keputusan kedepannya.

1. Bagi Penulis

- a. Semoga bisa jadi bahan referensi kedepannya untuk bahan bacaan dan penelitian berikutnya.
- b. Bisa menjadi penelitian lanjutan untuk di kembangkan.

BAB II

TUNJUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja

Kinerja dapat diartikan sebagai elemen yang keluar secara terorganisir. Gunakan beberapa metode untuk input kinerja, untuk proses administrasi dengan metode *performance* prestasi. (Uno, 2018)

Menurut Silaen, kinerja terbagi menjadi beberapa seperti individu, organisasi (team) yang memiliki tujuan dan harapan kedepannya. Namun peningkatan kinerja tidak hanya dilakukan apabila ada karyawan yang saling terbuka satu dengan yang lainnya sehingga bisa saling berkomunikasi. (Silaen et al., 2016)

Kinerja adalah prestasi seseorang atau sekelompok orang yang bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan cara yang sah, menjunjung tinggi moral dan etika, serta tidak melanggar hukum. Afandi 2018: 83). Kinerja adalah keberhasilan seseorang atau sekelompok orang yang bekerja dalam suatu korporasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing untuk memenuhi tujuan organisasi secara sah, tanpa melanggar hukum, dan dengan cara yang tidak bertentangan dengan moral dan etika. Menurut pernyataan Mangkunegara (2012) bahwa “kinerja pegawai adalah pencapaian hasil kerja pegawai secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya”, Menurut Siswanto (2015:11), kinerja adalah

keberhasilan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Dari sudut pandang ahli lain, yang menyatakan bahwa istilah “kinerja” berasal dari kata “job performance” yang merupakan kata lain dari “work performance” atau “actual performance” yang merupakan kata lain dari “actual achievement”. “khususnya “hasil kerja” atau “pencapaian kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang”, kita dapat melihatnya (Setyowati dan Haryani 2016). Moeheriono (2012:95) (2012:95)

Sasaran yang harus dipenuhi dalam suatu penugasan kerja untuk mencapai tujuan, memenuhi misi, dan melaksanakan rencana yang matang disebut sebagai sasaran kinerja. Kemudian Wibowo (2014:7) menyatakan bahwa kinerja adalah kegiatan padat karya yang menghasilkan prestasi profesional. Kinerja adalah seberapa baik seseorang melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya.

Kinerja dapat di artikan sebagai elemen yang keluar secara terorganisir. Gunakan beberapa metode untuk input kinerja, untuk proses administrasi dengan metode performance prestasi. Sedangkan menurut (Silaen et al., 2016) kinerja terbagi menjadi beberapa seperti individu, organisasi(team) yang memiliki tujuan dan harapan kedepannya. Namun peningkatan kinerja tidak hanya dilakukan apabila ada karyawan yang saling terbuka satu dengan yang lainnya sehingga bisa saling berkomunikasi.(Uno, 2018)

Dengan demikian, kinerja merupakan hasil dari kemampuan yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis dalam suatu organisasi.

2.1.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah gambaran kuantitatif tingkat pencapaian sesuatu kegiatan maupun sasaran yang telah diperhitungkan mulai dari masukan (Input), maupun keluaran (output) yang menghasilkan (*outcomes*) sehingga hasil akhir dari ini ialah manfaat yang yang diperoleh kita ambil contoh sederhana seorang karyawan yang bekerja selama 1 tahun yang slalu rajin bekerja tidak pernah absen serta penilaian jam masuk kerja tidak terlambat sehingga pada saat penilaian karyawan tersebut mendapat penilaian karyawan teladan yang bisa mempengaruhi kenaikan gaji di tahun berikutnya (Indahningrum et al., 2020).

Indikator kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2011) yaitu:

1. Kualitas kerja

Menunjukkan kerapihan, ketelitian, keterkaitan hasil kerja dengan baik dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan

2. Kuantitas kerja

Menunjukkan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu waktu sehingga efisiensi dan efektivitas

3. Tanggung Jawab

Menunjukkan seberapa besar pegawai dalam menerima dan melakukan pekerjaannya serta dapat memertanggung jawabkan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai tersebut.

4. Kerjasama

Pegawai berpartisipasi dengan pegawai lain secara *vertical* dan *horizontal* baik didalam maupun di luar pekerjaan sehingga pekerjaan akan semakin baik.

5. Inisiatif

Pegawai yang mempunyai inisiatif akan selalu mengatasi setiap masalah yang dialami selama bekerja dan tidak menunggu perintah dari atasan untuk mengerjakan pekerjaan lainnya.

2.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Abdul Wahab, pada obrolan yang sering dilakukan dalam bermasyarakat dan pendidikan sering mendengarkan komentar yang diberikan mengenai kebijakan public merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak jelas bentuknya dan tidak saling berkaitan langsung dalam kehidupan sehari-hari akan tetapi kebijakan adalah suatu konsep, pendapat. Untuk mengimplementasi kebijakan yaitu dengan cara membuat peraturan dan menulis serta mengedukasi kepada setiap manusia mengenai kebijakan sehingga manusia bisa memahami arti dari kebijakan kita ambil contoh sederhana yaitu kebijakan dalam memilih agama yang akan dianut.(Wahab, 2012)

2.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Banyak faktor yang bisa mempengaruhi kinerja kita ambil contoh sederhanya seperti karyawan yang di berikan *training* untuk menggunakan suatu sistem baru yang akan digunakan di perusahaan akan tetapi karyawan tersebut belum bisa menghafal *tools* atau *icon-icon* apa saja yang akan digunakan dalam memproses suatu data laporan sehingga mengakibatkan mempengaruhi kinerja dan menghambat dalam melakukan pekerjaan berikutnya (Mujit, 2018).

Performa adalah konsep multifaset dengan banyak elemen yang berdampak. Berikut beberapa faktor yang diklaim Simanjuntak dalam Widodo (2015: 133) mempengaruhi kinerja:

- 1) Pendidikan/pelatihan karyawan, motivasi kerja, etos kerja, sikap mental, dan kondisi fisik adalah beberapa contoh faktor yang mempengaruhi kualitas dan kompetensi karyawan.
- 2) Sarana pendukung, seperti masalah tempat kerja meliputi kesehatan kerja, keselamatan kerja, teknologi, fasilitas manufaktur, dan masalah kesejahteraan karyawan lainnya seperti jaminan sosial, upah/gaji, dan stabilitas pekerjaan.
- 3) Fasilitas Supra, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan peraturan pemerintah.

Menurut Sedarmayanti dalam Widodo (2015: 133), berikut adalah beberapa elemen yang berdampak pada kinerja::

- a) Pendidikan

Pendidikan standar yang dibuat untuk *merecruit* karyawan akan membuat cipta kerja atau kondisi dimana perusahaan akan berkembang karena pegawai yang memiliki pendidikan yang baik akan membuat perusahaan berkembang.

b) Keterampilan

Keterampilan yang dimiliki oleh setiap karyawan di suatu perusahaan mempunyai beragam macam sehingga banyak ide atau masukan untuk menciptakan sebuah inovasi untuk bisa memajukan perusahaan.

c) Manajemen kepemimpinan

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa *manage* segala sesuatunya dengan baik dan benar mulai dari pengelolaan karyawan, *manage* pengeluaran dan pemasukan suatu perusahaan sehingga bisa membuat perusahaan tersebut berkembang lebih cepat lagi serta karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut akan merasakan nyaman dan memberikan lebih untuk perusahaan.

d) Sikap dan mental seperti motivasi, disiplin kerja dan etika kerja

Pegawai yang atau manager yang baik akan memberikan motivasi untuk bawahan atau sesama rekan kerja untuk bisa disiplin di dalam pekerjaannya kemudian slalu menjaga etika dalam bekerja.

e) Tingkat penghasilan

Pegawai yang rajin akan memiliki penilaian setiap tahunnya sehingga setiap karyawan mempunyai tingkat penghasilan yang berbeda-beda,

karena semua di nilai dari seberapa besar karyawan tersebut memberikan dampak lebih untuk perusahaan.

f) Kesempatan berprestasi

Perusahaan yang baik akan memberikan kesempatan berkembang untuk pegawainya karena setiap pegawai ingin mempunyai penghasilan lebih dan jabatan yang baru sehingga setiap karyawan akan berlomba untuk bisa memberikan yang terbaik.

g) Sarana dan prasarana

Saran dan prasarana yang baik di dalam Perusahaan akan membuat karyawan merasakan nyaman sehingga karyawan tersebut akan memberikan hasil kerja yang jauh lebih baik karena semua yang di butuhkan karyawan tersebut sudah disediakan oleh perusahaan.

h) Gaji dan kesehatan

Perusahaan yang baik akan memperhatikan kesejahteraan karyawannya mulai dari kesehatan peningkatan kenaikan gaji setiap tahunnya serta tunjangan lainnya, yang bisa membuat karyawan tersebut merasa nyaman dan betah bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh pemimpin yang baik.

i) Jaminan sosial

Setiap perusahaan akan memberikan jaminan sosial, apabila dalam sebuah perusahaan tidak bisa memberikan jaminan sosial kepada karyawannya maka karyawan tersebut tidak akan betah bekerja di perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan banyak karyawan yang

keluar dan masuk yang bisa menyebabkan perusahaan tersebut dinilai buruk oleh para calon pekerja.

j) Teknologi

Perusahaan yang bisa mengikuti perkembangan jaman tidak akan berada di titik terendah atau merasakan bangkut, karena perusahaan yang bisa mengikuti perkembangan jaman akan bisa berkembang bersama karyawannya.

k) Iklim kerja

Davis dan Newstrom, mendefinisikan iklim organisasi sebagai lingkungan tempat para karyawan yang melakukan pekerjaan mereka disuatu organisasi.

Mangkunegara (2015:67) menjelaskan beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang berhubungan dengan kemampuan.

Secara psikologis, kemampuan dan realitas kemampuan (pengetahuan dan keterampilan), yaitu misalnya seorang pekerja dengan IQ di atas rata-rata sekitar 110–120, jika diberikan pendidikan yang mumpuni untuk mencapai suatu jabatan dan terampil dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, maka pekerja akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Akibatnya, sangat penting untuk menempatkan orang pada posisi yang sesuai dengan bidang kompetensi mereka.

2. Unsur-unsur yang memotivasi Sikap motivasi mengacu pada dorongan yang dimiliki karyawan untuk menghadapi keadaan di mana dia bekerja. Seorang karyawan mungkin diarahkan untuk mencapai tujuan kerja dengan menjadi termotivasi..

Kinerja seseorang pada umumnya dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain sebagai berikut:

- a) Sasaran

Sasaran yang dituju disini adalah karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan atau instansi yang terikat dengan Peraturan Perusahaan atau Peraturan Pemerintah.

- b) Standar

Standar di ini diartikan adalah sebuah tolak ukur perusahaan untuk karyawannya harus memenuhi standar perusahaan contohnya seperti tinggi badan, batas usia, dan Pendidikan.

- c) Umpan balik

Umpan balik disini, peneliti mengambil contoh dari sebuah mini market ketika ada seorang customer yang memberikan kritik dan saran kepada mini market tersebut, apabila pengelola bisa menerima dan memperbaiki kritik dan saran yang diberikan oleh customer tersebut bisa membuat mini market tersebut menjadi maju karena bisa menerima umpan balik dan memperbaiki kedepannya.

- d) Peluang

Karyawan atau orang yang bisa memanfaatkan peluang di setiap kesempatannya akan membuat mereka menjadi seorang yang bisa maju contoh di sini peneliti mengambil contoh seperti ada peluang untuk naik jabatan di sebuah perusahaan, bagi karyawan yang bisa memanfaatkan peluang ini maka ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada.

e) Sarana

Sarana yang memadai dan mendukung akan membuat suatu Wilayah atau Kota akan menjadi sebuah contoh untuk Kota ataupun wilayah lainnya, kita ambil contoh kecil dari Kota Batam yang sarana dari segi jalan yang luas dan tata letak bangunannya yang sudah di atur dalam Peraturan dan Pemerintahan sehingga akses jalan yang memadai membuat Kota Batam bisa menjadi Contoh dalam tata letak pemabangunan.

f) Kompetensi

Kompetensi di sini saya ambil contoh ambil dari karyawan yang memiliki kompetensi lebih bisa dijadikan contoh untuk karyawan lainnya sehingga bisa memberikan enegergi *positif* untuk perusahaan maju bersama.

g) Motivasi

Atasan atau manager yang baik bisa memberikan motivasi untuk karyawan atau bawahannya untuk slalu berifikir *positif* dan berfikir panjang serta slalu memberikan yang terbaik untuk Perusahaan,

sehingga apabila ada kesempatan untuk naik ke jenjang yang lebih baik lagi bisa maju dan memberikan motivasi ke *Generasi* berikutnya.

2.4 Implementasi Perda No 2 Tahun 2011

Perda Daerah Kota Batam No 2 Tahun 2011 mengenai Bangunan dan Gedung menjelaskan mendirikan Bangunan gedung sesuai persyaratan Pembangunan yang berwawasa lingkungan, penataan dan penertiban bangunan dalam wilayah Kota Batam, dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guna tercapainya keserasian dan kelestarian lingkungan, perlu adanya penertiban dan pengaturan atas kegiatan mendirikan, memanfaatkan dan merobohkan bangunan (Batam, n.d.).

Menurut Maulana dan Jamhir perizinan memiliki arti luas yang di mana salah satu instrument pengurusan izin yang bisa di gunakan oleh pihak yang menggunakannya, izin merupakan persetujuan atau penguasaan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Sedangkan izin dalam artian sempit yaitu pengingkatan pada suatu peraturan izin yang umumnya digunakan untuk hal-hal tertentu. (Rifqy Maulana, 2018)

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode	Temuan
1.	Sanjaya A Manalu (2019)	Efektivitas Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung (Studi Pada Penataan Pemukiman Kumuh Di Kota Bandung)	Kualitatif	Aparatur Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung harus lebih mengoptimilisasikan kemampuannya.
2.	Laporan Kinerja (LKJIP) Satpol PP Kota Batam Tahun 2019	Laporan Kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2019	Kualitatif	Selama tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tidak ada pembinaan Satlinmas akibat rasionalisasi anggaran sebagai akibat difisit APBD tingkat Kota Batam
3.	Kadek Darianti, Made Arie Wahyuni dan Gede Ade Yuniarta (2017)	Pengukuran Efektivitas Kinerja Berdasarkan Metode Performance Prism Pada LPD Desa Pakraman Panji Kecamatan Sukasada	Kualitatif	Peran dan kontribusi stakeholder, peran masyarakat dan gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja LPD selain dari tiga indicator kapabilitas, strategi serta proses.
4.	Siti Almaidah (2017)	Analisis Efektivitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Menyelenggarakan Program Pendidikan Berbasis Masyarakat	Kualitatif	Kegiatan PKBM sudah memberikan fungsi dan kinerjanya sehingga masyarakat lebih terampil serta masih perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi PKBM.
5.	Anwar Sadat (2016)	Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana di Kota Baubau	Kualitatif	Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah cukup memuaskan dalam produktivitas aparat, kualitas pelayanan serta

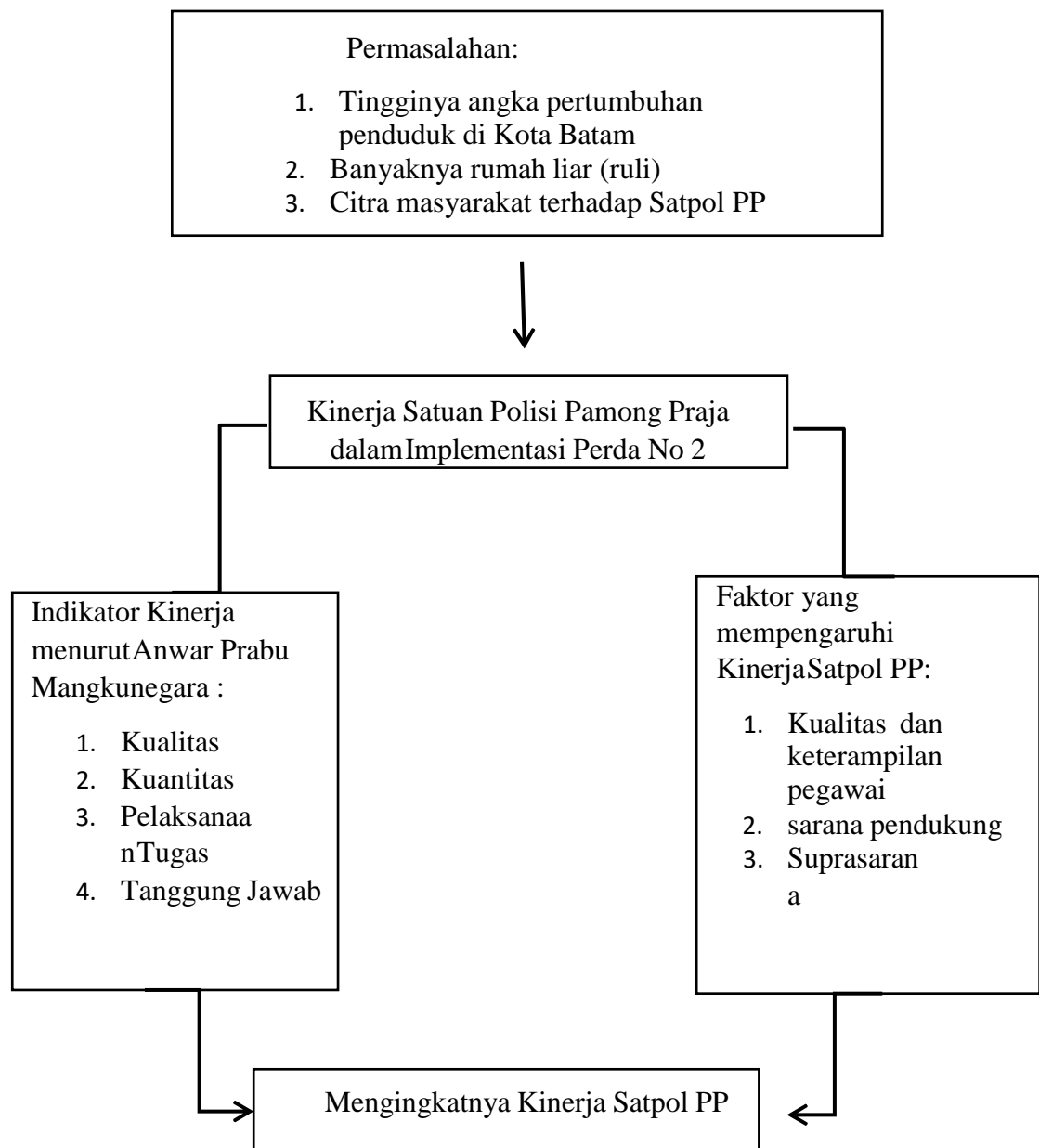
				responsivitas namun masih perlu perbaikan dalam peningkatan pelatihan pegawainya.
6.	Gilbert Pahul Tehupuring, Nicholas Retraubun dan Maya Felice Telussa (2019)	Analisis Efektivitas Kinerja Dermaga Haria Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah	Kualitatif	Dermaga Haria sudah tidak efektif karena memiliki nilai bor 105,97% (melebihi yang disarankan <i>UNCTAD</i> atau <i>United Nation Conference on Trade and Development</i>)
7.	Rita Friyani dan Riski Hernando (2019)	Determinants of the Effectiveness of Implementation Performance Based-Budgeting and Budget Absorption in Local Governments	Kualitatif	Efektivitas penyerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran
8.	Suci Rahmadhani dan Zikri Alhadi	Efektivitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kualitatif	Menyimpulkan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran kota Batam yang belum efektif dalam mencegah kebakaran karena kurangnya sarana dan prasarana, anggaran serta faktor dari Sumber Daya Manusianya
9.	Dompok Sibarani (2020)	Aspek Pemberdayaan Kelurahan dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Kualitatif	Pemberdayaan diartikan sebagai proses mempengaruhi kepada yang lemah dengan mengurangi kekuasaan pada pihak yang kuat dengan tujuan menciptakan masyarakat yang independen serta didukung beberapa faktor penting seperti mobilitas yang bebas, adanya kapabilitas membeli komoditi yang minoritas serta terlibat

				dalam keperluan rumah tangga
10.	Andi Rendra Rangkuti (2016)	Efektivitas Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kota Batam	Kualitatif	untuk menganalisa dan menguraikan faktor apa saja yang menyebabkan banyak tanah terlantar di Kota Batam, menganalisa efektivitas dan pendayagunaan tanah terlantar serta solusi terbaik untuk melakukan penertiban tanah terlantar untuk terciptanya iklim investasi yang lebih baik di Kota Batam
11.	Agustinus Pandiangan (2018)	Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau	Kualitatif	Satuan polisi Pamong Praja merupakan aparat yang sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah
12	Angga Setyo Pramono (2019)	Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Semarang	Kualitatif	untuk mengetahui profil gangguan ketertiban umum, pelaksanaan tugas Satpol PP, serta hambatan Satpol PP dalam pelaksanaan tugas penanganan gangguan ketertiban Kota Semarang tahun 2019
13.	Indah Sulisdiani (2010)	Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Pontianak	Kualitatif	mendesripsikan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugasnya

				melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pontianak Tenggara
--	--	--	--	---

Sumber: Data Penelitian 2022

2.6 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, agar dapat data yang relevan dan valid maka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Sehingga informasi yang akan diperoleh dari informan yang akurat dan lengkap sesuai dengan maksud tujuan penelitian. Maka metode penelitian merupakan dasar tumpuan berfikir bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

Penulis mempertimbangkan menggunakan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015:35-36) adalah:

1. Apabila menemui pernyataan ganda menggunakan metode kualitatif lebih mudah.
2. Secara tidak langsung hakekatnya berhubungan antara peneliti terhadap responden. Metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan terhadap polapoli nilai yang dihadapi.
3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi.

Pada metode ini penulis menggunakan dengan cara pendekatan kualitatif, dalam penelitian didapatkan data akurat, nyata serta tersistem sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, penelitian kualitatif masih bisa berkembang serta berubah sesuai dengan kondisi di lapangan yang di dapat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan disini mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan dan rumah liar dengan permasalahan izin yang berlokasi pada simpang barelang, karena disana jalan akses menuju tempat wisata Jembatan Barelang dan tempat wisata lainnya sehingga akses menuju kesana perlu diperluas, bangunan liar yang berada di pinggir jalan harus digusur karena mengakibatkan kemacetan dan membuat akses terhambat, serta dimana masih banyak bangunan liar yang tidak memiliki Izin sehingga perlu ditertibkan kembali supaya tata letak kelola Kota Batam dapat terdata dan terstruktur.

Pendapat Spradley (2015:209) tentang focus penelitian adalah beberapa atau domain tunggal yang terdapat disituasi lapangan. Diketagui focus penelitian dalam penelitian ini adalah kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kota Batam dalam implementasi Perda No 2 Than 2011 yang menggunakan titik penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja kota Batam.

Adapun Sugiyono (2015:209) mempunyai pendapat tentang gejala penelitian kualitatif yaitu sebagai aspek sosial yang terdiri dari empat aspek yaitu tempat aktivitas sosial masyarakat.

3.3 Sumber Data

Peneltian menggunakan sumber serta teknik sebagai berikut :

1. Penelitian dengan menggunakan data *primer* yang dimana metode ini terjun langsung ke lapangan mewawancarai pihak yang sedang

bertugas yaitu Polisi Pamong Praja yang bertempat di Kota Batam, serta tidak lupa warga sekitar ikut andil dalam proses wawancara.

2. Sumber berikutnya yang didapat dari penelitian ini yaitu dengan referensi buku-buku, jurnal serta penelitian terdahulu.

Tabel 3.1 Daftar Informan

No.	Informan	Jumlah
1	Petugas satuan polisi pamong Praja	2
2	Masyarakat	3

(Sumber: Hasil Observasi Peneliti)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang sudah dilakukan kemudian menggunakan teknik kualitatif yang dimana data atau sumber diperoleh dari proses observasi, wawancara atau interview dengan beberapa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam serta langsung kepada warga sekitar yang telah ditunjuk dalam data informan didampingi oleh Polisi Pamong Praja, di Kota Batam.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, Sugiyono (2015:193) mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Observasi berkaitan dengan suatu peristiwa yang tampak dan mungkin diamati secara sistematis. Pengamatan merupakan kegiatan yang sulit karena melibatkan pengamatan langsung terhadap indikasi yang akan diteliti secara seksama serta pengecekan secara berkala terhadap aktualitas dan validitasnya.
2. Wawancara adalah kegiatan yang melibatkan dua atau lebih individu dan menjawab pertanyaan dengan informan secara langsung atau tidak langsung. Satpol PP Kota Batam yaitu Bapak Alex (Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian dan Bapak Ronie Anggota Satpol PP, serta anggota masyarakat dan peserta lainnya.

3. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan dokumen bukan topik kajian secara langsung. Tulisan-tulisan berupa catatan sejarah, artikel berita, laporan, peraturan, dan kebijakan adalah contoh dokumen yang dapat digunakan. Anda dapat menggunakan kertas dalam bentuk gambar, seperti foto, untuk penelitian agar dapat memeriksa dengan tepat.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif berdasarkan yang digunakan Sradley dalam Sugiono (2015: 253-254) yaitu menentukan “*key informan*” sebagai kunci atas penelitian serta dilanjutkan dengan wawancara dan hasilnya yang disajikan dalam data. Selanjutnya peneliti harus fokus pada penelitian dan menanyakan hal-hal yang bersifat menjabarkan kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis yang terdiri analisis taksonomi dan analisis domain. Analisis taksonomi bersifat bertolak belakang, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode analisis data berawal dari yang luas lalu menjadi yang lebih luas lagi. Sugiyono (2015:207) menjelaskan sebagai berikut kegiatan analisis data ini:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mengidentifikasi informasi kunci sehingga berkonsentrasi pada apa yang signifikan dan mencari esensi dari kumpulan data. Informasi yang terkumpul melalui kegiatan ini akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan mencari data lain yang dapat membantu penelitian ini.

2. Penyajian Data

Rangkuman singkat, grafik, tabel, dan korelasi antar kategori dapat digunakan dalam kegiatan penyajian data. Penyajian data dari penelitian kualitatif berupa teks naratif dan deskripsi.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Hasil dari tindakan kesimpulan/verifikasi ini biasanya dibedakan berdasarkan temuan baru yang sebelumnya belum ditemukan. Kesimpulan tersebut dapat berupa gambaran atau gambaran yang jelas dari objek yang sebelumnya samar-samar menjadi lebih jelas sebagai hasil penelitian. Outcome tersebut dapat berupa hubungan antar data yang kemudian menjadi dasar suatu penelitian..

Penelitian ini akan mendapatkan hasil secara detail dengan data yang diperoleh dari *key informan* sebagai narasumber serta beberapa warga yang dijadikan narasumber. Penelitian ini juga menjadi rujukan untuk Satuan Polisi Pamong Praja kota Batam dalam meningkatkan kinerja yang selama ini sudah cukup baik dalam menertibkan bangunan tanpa izin atau sering disebut bangunan bermasalah dan atau bangunan liar kota Batam.

3.6 Keabsahan Data

Data yang valid dalam penelitian kualitatif diuji dengan cara dibawah ini:

a. Credibility

Adalah kredibilitas dalam penelitian yang berarti ketekunan dan ekstensi dalam suatu pengamatan untuk memperkuat data penelitian, triangulasi bertujuan untuk memuji kredibilitas data tersebut serta diskusi dengan teman atau informan tentang pokok bahasa penelitian tentang kebijakan pemerintah atau organisasi, analisis kasus positif dan negatif serta yang terakhir tentang membercheck.

b. Pengujian Transferrability

Yaitu penerapan hasil penelitian dari sampel yang sudah ditentukan ke populasi. Dalam hal ini peneliti harus menyajikan hasil laporan yang jelas serta terperinci dan terpercaya agar dapat dimengerti orang lain.

c. Pengujian Dependability

Disebut realibitas yang bermakna peneliti dapat melakukan penelitian lagi dengan proses audit secara menyeluruh dalam proses penelitian

d. Pengujian Konfirmability

Makna lainnya adalah penelitian bersifat objektif yang bermakna penelitian sudah sesuai dengan fungsi yang sudah dilakukan.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi

Penelitian ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Batam yang beralamatkan di Jalan B Barigjen Katamso No 1, Sagulung Koata Batam lebih tepatnya di Simpang Barelang serta beberapa tempat responden masyarakat Kota Batam.

3.7.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		Okt 2022				Nov-22				Des 2022				Jan-23			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Pustaka																
2	Penyusunan Proposal																
3	Pengumpulan Data																
4	Penelitian Lapangan																
5	Pengolahan Data																
6	Analisis dan Kesimpulan																
7	Penulisan Laporan Akhir																
8	Penyerahan Laporan																

(Sumber: Hasil Observasi Peneliti)